

**UANG PANAIK DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM DI
KECAMATAN KAJUARA KABUPATEN BONE**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Alauddin Makassar

Oleh :
MILAWATI
NIM. 10200113014

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Milawati
NIM : 10200113014
Tempat/Tgl lahir : Bonto Bulaeng, 02 November 1995
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Uang Panaik Dalam Pandangan Ekonomi Islam di Kecamatan
Kajuara Kabupaten Bone

Dengan penuh kesadaran. Penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 20 November 2017

Penulis

Milawati
NIM : 10200113014



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I, Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II, Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 SamataSungguminasa-GowaTlp. (0411) 424835 Fax 424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, *"Uang Panaik Dalam Pandangan Ekonomi Islam di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone"*, yang disusun oleh *Milawati* NIM: *10200113014*, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 03 November 2017, bertepatan dengan 13 Shafar 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 03 November 2017 M.
13 Shafar 1439 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag

Sekretaris : Dr. H. Abdul Wahab, S.E., M.Si

Munaqisy I : Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag

Munaqisy II : Ismawati, SE., M.Si

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag

Pembimbing II : Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh:

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar**

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitian berjudul **“Uang Panaik dalam Pandangan Ekonomi Islam di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone”**.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak terutama Ayahanda Amirudin dan Ibunda Nurlaelah selaku orang tua tercinta, yang sungguh penulis tak mampu membalas setiap pengorbanannya selama ini, yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, pada kesempatan yang baik ini, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbbari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dan selaku pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktunya dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan masukan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
3. Ibu Dr. Hj. Rahmawati Muin, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar juga selaku penguji yang telah menguji dan memberi saran untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Thamrin Logawali., MH selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. M. Thahir Maloko, M. Hi., selaku Pembimbing Kedua yang dapat meluangkan segenap waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sampai skripsi ini selesai dengan baik.
6. Ibu Ismawati SE., M.Si selaku penguji yang telah menguji dan mengoreksi skripsi ini hingga akhirnya terselaikan juga.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan, memberikan ilmu pengetahuan, selama penulis melakukan studi.
8. Para Staf dan Karyawan Fakutlas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah membantu kelancaran proses administrasi.
9. Para Pemimpin Kantor Camat Kajuara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Hal yang smaa juga saya sampaikan kepada Kepala KUA Keamatan Kajuara, juga kepada masyarakat Kecamatan Kajuara yang telah membantu melakukan wawancara dari penulis. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan dari Allah swt.
10. Kepada seluruh keluarga besar penulis kakak-kakak dan adik-adik saya yang telah memberikan dukungan yang tiada hentinya buat penulis.
11. Teman–teman kuliah Jurusan Ekonomi Islam A Angkatan 2013 khususnya kepada Wana, Ana, Nini, Ica dan Maudy terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama ini.

12. Kepada seluruh Sahabat-Sahabatwati pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa dan terkhusus kepada Sahabatku yang ada di Rayon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin.
13. Kepada Muh. Fathur Rahman Mahka yang selalu sabar membantu, memberikan semangat luar biasa, dan mendukung disetiap kesulitan selama penyusunan skripsi ini.
14. Kepada semua pihak yang telah berjasa kepada Penulis yang hanya keterbatasan ruang hingga tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang dimiliki. Namun besar harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pembaca.

Makassar, 3 Oktober 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Milawati

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Grand Theory	13
B. Uang Panaik dalam Perkawinan Suku Bugis.....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Islam.....	20
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Instrumen Penelitian.....	30
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	31
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33

B. Proses terjadinya perkawinan.....	34
C. Kedudukan Uang Panaik ditinjau dari Hukum Adat di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.....	42
D. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Uang Panaik dalam Perkawinan adat di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.....	51
E. Hikmah Uang Panaik	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Implikasi Penelitian.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(’).

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	A dan u

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
أُوْ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

D. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan

ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

: *al-madinah al-fadila*



ABSTRAK

Nama : Milawati
Nim : 10200113014
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul : *Uang Panaik Dalam Pandangan Ekonomi Islam di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone*

Skripsi ini membahas tentang bagaimana kedudukan uang panaik dalam pernikahan adat di kecamatan Kajuara kabupaten Bone dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap uang panaik dalam perkawinan adat di kecamatan Kajuara kabupaten Bone.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan uang panaik dalam pernikahan adat kecamatan Kajuara kabupaten Bone dan untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap perkawinan adat kecamatan Kajuara kabupaten Bone.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tempat penelitian ini adalah kecamatan Kajuara kabupaten Bone.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uang panaik di kecamatan Kajuara memang harus ada, tidak akan ada pernikahan jika tidak ada uang panaik akan tetapi uang panaik yang terjadi di kecamatan Kajuara belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, meskipun awalnya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu keluarga mempelai wanita dan laki-laki tetapi dalam hal penetapan uang panaik hanya satu pihak yang di bebaskan yaitu pihak laki-laki.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk Propinsi Sulawesi Selatan secara garis besarnya dapat dibedakan atas empat suku , yaitu suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Keempat suku tersebut, yang terbesar populasinya adalah suku Bugis dan mendiami sebagian besar daerah Sulawesi Selatan. Dari 24 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan, suku Bugis banyak terkonsentrasi serta mendiami Kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Sidenreng Rappang, Pare-pare, Barru dan Pinrang. Jumlah penduduk suku Bugis cukup besar yang tersebar di kabupaten dan kota di seluruh Sulawesi Selatan.

Suku Bugis yang bertempat tinggal di daerah tersebut memiliki kebudayaan sebagai dasar dalam mengatur tata cara hidupnya. Kebudayaan Bugis di beberapa kabupaten/kota tersebut pada dasarnya sama. Perbedaan yang tidak terlalu prinsipil terdapat pada perbedaan variasi pelaksanaannya.

Dalam melangsungkan pernikahan, calon suami diwajibkan memberi sesuatu kepada calon istri, baik berupa uang ataupun barang (harta benda). Pemberian inilah yang dinamakan mahar. Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki dan sudah disepakati oleh keluarga laki-laki dengan keluarga wanita. Selain mahar, di Sulawesi Selatan khususnya di kabupaten Bone mewajibkan calon pengantin laki-laki menyerahkan *uang panaik* (uang belanja) kepada calon pengantin wanita.

Tata cara pernikahan adat suku Bugis diatur sesuai dengan adat dan agama sehingga rangkaian upacara yang menarik, penuh tata krama dan sopan santun serta saling menghargai.¹ Karena masalah perkawinan suatu masalah yang erat sekali hubungannya dengan perasaan, kesadaran serta pandangan hidup masyarakat beserta orang-orang yang bersangkutan, bukan saja faktor agama yang mempunyai peranan besar dalam lapangan perkawinan, tetapi juga faktor-faktor sosial lainnya seperti kehidupan kebudayaannya, adat istiadat dan lain sebagainya.

Dalam perkawinan adat tradisional, nampak dengan jelas sifat komunalnya, sebab perkawinan itu, dianggapnya sebagai masalah yang menyangkut tidak hanya terbatas sampai kepentingan seluruh kesatuan masyarakat hukumnya.²

Di samping itu pula manfaat dari perkawinan adalah bahwa perkawinan itu dapat menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang oleh Allah swt. dan untuk mendapat kasih sayang (*mawaddatan warahmah*) suami istri yang dihalalkan oleh Allah swt. Hal ini diinyalir oleh Allah swt. dalam QS Ar-Rum / 30 : 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹ Andi Nuraga, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis* (Makassar: CV. Telaga Zamzam, 2001), h. 1-4

² Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan* (Cet. II; Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983), h. 118

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Ayat tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu tanda-tanda kebesaran Allah swt. adalah diciptakan-Nya laki-laki dan perempuan agar dapat hidup harmonis dan bahagia di atas bumi ini.

Hikmah yang dapat ditimbulkan dengan dilaksanakannya perkawinan yaitu untuk menjalin ikatan kekeluargaan antara keluarga istrinya untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia.⁴

Lain halnya yang penulis jumpai pada masyarakat di kecamatan Kajuara kabupaten Bone, masih banyak yang melakukan salah satu bentuk proses persyaratan pra pernikahan yaitu memberikan sejumlah uang belanja yang biasa disebut dengan *uang panaik*/uang belanja dan bahkan hal itu dijadikan landasan utamanya, dan biasanya keluarga gadis menuntut jumlah uang tertentu untuk menguji atau mengetahui kerelaan, kesanggupan berkorban pihak laki-laki sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota keluarga dan apabila pihak laki-laki tidak dapat

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pusaka Indonesia, 2012), h. 572

⁴ H.S. A. Al-Hamdani, *Risalatun Nikah*, Diterjemahkan oleh Drs. Agus Salim, Dengan Judul “Hukum Perkawinan Islam” (Cet. III; Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 27

memenuhi permintaan orang tua perempuan tersebut, maka lamaran laki-laki itu biasanya ditolak. Melihat yang demikian itu otomatis memberatkan pihak laki-laki dalam melaksanakan suatu perkawinan.

Padahal ajaran Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk mempermudah terjadinya suatu perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nur / 24 : 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang beriman, di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberi-Nya) lagi mengetahui.”⁵

Maksud dari ayat tersebut adalah hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Olehnya itu, selayaknya manusia mempermudah terlaksananya suatu perkawinan jangan hanya karena persoalan uang belanja sehingga terhalang terjadinya suatu perkawinan, karena boleh jadi antara seorang wanita dan seorang pria yang sudah saling mencintai menempuh suatu jalan untuk yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama.

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 494

Islam sendiri, *uang panaik* tidak dijelaskan sama sekali karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk adat yang ada dalam masyarakat Bugis di kecamatan Kajuara khususnya dan menjadi keharusan jika ingin melaksanakan pernikahan. Walaupun sering terjadi *complain* tentang *uang panaik* ini dalam masyarakat yang lebih mengutamakan bentuk perkawinan ala Islami tanpa harus disertai adat istiadat yang terkadang memberatkan dan merepotkan, karena perkawinan yang Islami itu cukup dengan hanya memberikan mahar dan mengenai jumlah mahar tidak ditentukan sesuai kemampuan pihak laki-laki, sebagaimana hadis Nabi saw.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَكْبَرَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُ مَثْوًى. أحمد

Artinya:

“Dari ‘Aisyah RA, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya”.⁶ [HR. Ahmad no.24595]

Besaran *uang panaik* yang berlaku saat ini dipengaruhi oleh status sosial yang melekat pada orang yang akan melaksanakan pernikahan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, faktor popularitas, dan apalagi jika orang tersebut berketurunan ningrat atau darah biru, semakin tinggi derajat semua status tersebut maka akan semakin tinggi pula permintaan *uang panaik* nya, tidak jarang banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan kerana tidak terpenuhinya permintaan *uang panaik* tersebut.

⁶Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hambal VI* (Beirut: Dar Ihya' al-Taris al-Arabi, t.t), h. 82.

Bahkan hal persyaratan utamanya atau menjadi pembahasan pertama pada pelamaran sebelum melangsungkan perkawinan adalah besaran “*uang panaik*” (uang belanja), *uang panaik* atau uang belanja adalah uang yang harus diberikan, calon mempelai laki-laki pada calon mempelai perempuan. *Uang panaik* ini seringkali di maknai dengan keliru karena di anggap atau dipersamakan dengan mahar, padahal *uang panaik* tersebut berbeda dengan mahar. Kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga mempelai.

Uang panaik juga akan semakin berat ketika keluarga mempelai perempuan meminta *sompa* (harta tidak bergerak seperti sawah dan kebun), *erang-erang* (asesoris resepsi pernikahan). Pembayaran *uang panaik* ini dapat dilakukan pada saat lamaran telah diterima atau penentuan hari perkawinan atau pada saat *mappaenre doi'* (hari memberikan uang belanja), ataupun pada saat akad nikah akan dilangsungkan. Adapula yang melakukan pembayaran sekaligus dan ada yang melakukan pembayaran sebagian dan di selesaikan pada saat akad nikah akan dilangsungkan.

Melihat realitas yang ada, arti *uang panaik* ini sudah bergeser dari maksud sebenarnya, *uang panaik* sudah menjadi ajang gengsi untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi secara berlebihan, tidak jarang untuk memenuhi permintaan *uang panaik* tersebut maka calon mempelai pria harus rela berutang, karena apabila prasyarat *uang panaik* tersebut tidak terpenuhi akan dianggap sebagai malu atau “*siri*” (rasa malu atau merasa harga diri dipermalukan). Bahkan tak jarang permintaan *uang panaik* dianggap sebagai senjata penolakan pihak perempuan

bagi pihak laki-laki yang datang meminang jika pihak laki-laki tersebut tidak di restui oleh orang tua pihak perempuan dengan modus meminta *uang panaik* yang setinggi-tingginya yang mereka anggap bahwa laki-laki yang bermaksud meminang tersebut tidak mampu memenuhi permintaan *uang panaik* tersebut.

Pernikahan dengan *uang panaik* yang sangat mahal dan pesta yang mewah adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariah. Pernikahan yang paling diberkahi adalah pernikahan dengan biaya/beban yang lebih sedikit. Setiap berkurangnya beban/biaya pernikahan, maka bertambahlah berkah.

Persoalan ini adalah kebanyakan disebabkan oleh para wanita. Wanita-wanita adalah orang yang sering meminta kepada suami mereka untuk menentukan nilai *uang panaik* yang sangat tinggi (untuk anak perempuan mereka). Jika nilai *uang panaik* yang ditawarkan lebih rendah, maka mereka akan mengatakan anak perempuan mereka pantas menerima seperti ini dan itu. Kemudian pesta pernikahan yang mahal dan mewah adalah dilarang oleh syariah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-A'raf / 7: 31 :

... وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

“... dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”⁷

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 207

Banyaknya uang panaik itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridhoan si istri. Dengan demikian, suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya karena *uang panaik* itu apabila telah ditetapkan, maka jumlahnya menjadi utang atas suami, dan wajib dibayar sebagaimana halnya utang kepada orang lain. Kalau tidak dibayar, akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kemudian. Janganlah terpedaya kebiasaan bermegah-megah dengan banyak mahar sehingga si laki-laki menerima perjanjian itu karena utang, sedangkan dia tidak ingat akibat yang akan menimpa dirinya. Perempuan (istri) pun wajib membayar zakat maharnya itu sebagaimana dia wajib membayar zakat utangnya yang dipiutangnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *Uang Panaik Dalam Pandangan Ekonomi Islam di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone*.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian berfokus pada *uang panaik* dalam pandangan ekonomi Islam di kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

2. Deskripsi Fokus

Demi menghindari kesalah-pahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa variabel yang dianggap penting. Antara lain :

- a. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.
- b. *Uang panaik* adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon isteri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kedudukan *uang panaik* dalam pernikahan adat di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap *uang panaik* dalam perkawinan adat di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone?

D. Kajian Pustaka

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu *uang panaik dalam pandangan ekonomi islam*. adapun literatur yang membahas tentang masalah ini, namun belum

ada literatur yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Prof. Dr. H. Idris, M. Ag dalam bukunya *Hadis Ekonomi*, buku ini membahas tentang Ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi.
2. A. Rahman dan Aminah Hamzah dalam bukunya *Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan*, buku ini membahas tentang perkawinan daerah Sulawesi Selatan di antaranya suku Bugis, Makassar, Mandar dan Tana Toraja. Secara umum dalam buku ini di bahas mengenai adat dan upacara sebelum perkawinan sampai adat dan upacara setelah perkawinan. Adapun perbedaan utama dengan penelitian ini adalah buku tersebut tidak menjelaskan secara spesifik dalam konteks uang panaik yang dilakukan pada saat pelamaran pernikahan di suku bugis yang masih mendahulukan adat.
3. Rika Elvira dalam skripsinya yang berjudul *Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (UangPanai') Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah pentingnya Uang Panaik untuk dibuatkan akte perjanjian formil yang sah untuk lebih memahami esensi perikatan yang lahir dari perjanjian dalam perkawinan suku bugis makassar serta untuk memahami satu unsur kebudayaan yang sangat mengikat pada suku bugis makassar sebagaimana tertuang dalam

semboyan siri' na pacce. Adapun kesamaan utama dengan penelitian adalah bahwa penelitian di atas menjelaskan tentang uang panaik yang dilakukan pada saat pelamaran pernikahan di suku bugis yang masih mendahulukan adat.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kedudukan *uang panaik* dalam pernikahan adat kecamatan Kajuara kabupaten Bone.
- b. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap perkawinan adat kecamatan Kajuara kabupaten Bone.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sebagai masukan dalam memahami tentang perihal pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat suku bugis Bone kecamatan Kajuara kabupaten Bone.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat suku bugis Bone kecamatan Kajuara kabupaten Bone dalam pelaksanaan perkawinan adat tentang *uang panaik*.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Grand Theory*

1. Teori Uang Panaik

Secara sederhana, *uang panaik* atau uang belanja yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. *Uang panaik* tersebut ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. *Uang panaik* memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu rukun dalam perkawinan adat suku Bugis. Pemberian *uang panaik* adalah salah satu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. *Uang panaik* ini tidak terhitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga.¹

Penentuan besarnya uang belanja atau *uang panaik* itu tidak sama halnya dengan pemberian uang *sunrang*, yakni sesuai dengan kerelaan pihak keluarga laki-laki dan berdasarkan strata sosial kedua belah pihak.

Sunrang atau mas kawin (mahar) diberikan oleh keluarga pihak laki-laki kepada calon pengantin perempuan sebagai milik pribadinya, maka uang panaik diberikan kepada pihak keluarga perempuan sebagai sumbangan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan upacara pesta perkawinan, jumlah yang harus diberikan kepada pihak keluarga perempuan itu biasanya lebih besar bila dibandingkan dengan

¹<http://wijatobone.blogdetik.com/feed/>, diakses pada 3 Januari 2017

sunrang maupun hadiah-hadiah lainnya.² Jumlah uang mahar biasanya hanya berkisar Rp 10.000 sampai jutaan. Mahar untuk saat ini biasanya lebih mengutamakan aset seperti emas dan tanah.

Akan tetapi *uang panaik* adalah hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Bahkan terkadang terjadi saling tawar-menawar. Itulah sehingga biasa memerlukan waktu yang berlarut-larut karena masing-masing pihak bertahan. Bahkan boleh jadi penentuan uang belanja yang begitu tinggi yang diminta oleh pihak perempuan hanya bermotif penolakan lamaran secara halus.

Besarnya *uang panaik* tidak selalu dianggap memiliki nilai rupiah saja, melainkan lebih dari itu. Besarnya uang yang dinaikkan itu dapat juga merupakan prestise di mata masyarakat, sebab semakin besar mendapatkan uang belanja dari pihak laki-laki, berarti pula baik yang bersangkutan maupun segenap keluarga dan kerabatnya yang lain akan merasa prestisenya juga naik. Sehingga ada kesan bahwa besarnya uang belanja itu menandakan tinggi rendahnya strata sosial mereka di tengah-tengah masyarakat.

Nampaknya memang demikian yang terjadi di tengah masyarakat Bugis, makin tinggi derajat seseorang di tengah-tengah masyarakat, maka uang belanja yang akan diminta lebih besar pula. Karena itulah, pihak keluarga perempuan akan berusaha agar pihak laki-laki bersedia memberikan uang naik sebanyak mungkin dan meningkatkan prestisenya di tengah masyarakat.

² Nur Alam Saleh, *Sistem Upacara Perkawinan Adat Makassar di Sulawesi Selatan* (Makassar: Kanwil P, Kecamatan Suli, 1996), h. 124

Mengenai tinggi *uang panaik* yang diberikan kepada pihak keluarga pengantin perempuan, tidak mutlak berdasarkan karena status kebangsawannya semata. Akan tetapi, banyak faktor penyebabnya, antara lain karena memiliki kekayaan, semakin kaya calon mempelai semakin tinggi pula *uang panaik* yang dipatok, jenjang pendidikan, besar kecilnya *uang panaik* sangat terpengaruh jenjang pendidikan calon istri, apabila pendidikannya hanya tingkat Sekolah Dasar maka semakin kecil pula *uang panaik* yang dipatok begitu pula sebaliknya jika calon istri lulusan sarjana maka semakin tinggi pula jumlah nominal *uang panaik* dan parasnya cantik, tinggi badan, dan kulit putih. Semua faktor ini tetap saling berhubungan, bisa saja calon istri tidak memiliki paras yang cantik tapi kondisi ekonomi yang kaya, tetap saja *uang panaik* akan tetap tinggi. berlatar belakang pendidikan yang tinggi (sarjana) memiliki kelebihan tertentu (prestasi) dan sebagainya.

Di samping itu, indikator besar kecilnya *uang panaik* bisa dilihat dari kemewahan pesta pernikahan. Kaum elit Bugis-Makassar yang biasanya dari golongan wiraswasta (pebisnis) dan pemangku jabatan tinggi di suatu instansi, mengadakan resepsi di tiga tempat; rumah mempelai laki-laki, rumah mempelai perempuan, dan di gedung. Pemilihan gedung sebagai tempat dilangsungkannya resepsi pernikahan juga bisa dijadikan ukuran kaya tidaknya keluarga yang mengadakan pesta tersebut. Jika resepsinya di hotel mewah, maka sudah pasti ia orang kaya, dan *uang panaik* nya tanpa perlu diketahui orang lain berapa tepat nominalnya, sudah tentu besar.

Cuma yang menjadi permasalahan adalah karena terkadang suatu lamaran perkawinan tidak diterima disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan tentang uang belanja, di mana kita ketahui bersama bahwa hal tersebut bukanlah suatu perkara wajib dalam perkawinan sebagaimana wajibnya membayar mahar.

B. Uang Panaik dalam Perkawinan Suku Bugis

1. Sejarah Munculnya Uang Panaik

Apabila membuka kitab-kitab fiqih, maka tidak ada satu pun pembahasan yang menyinggung persoalan *uang panaik*. Dari sini pula, penulis menganalisa bahwa persoalan *uang panaik* adalah persoalan adat murni dan bukan termasuk hal yang *masyru'iyah*. Malah lebih dari itu, penulis memprediksikan bahwa *uang panaik* atau yang lebih dikenal dengan istilah “*doi balanca*” hanya dikenal dalam perkawinan adat Bugis.

Selanjutnya mengenai latar belakang munculnya *uang panaik* adalah karena disebabkan oleh adanya pesta perkawinan yang diusahakan diselenggarakan dengan semeriah mungkin. Untuk dapat melaksanakan pesta perkawinan dengan semeriah mungkin hanya dapat diwujudkan apabila dana yang tersedia cukup besar. Hal itulah yang menyebabkan masyarakat suku Bugis memberlakukan adanya *uang panaik*.

2. Tujuan Uang Panaik

Pada umumnya *uang panaik* dalam perkawinan itu adalah dengan tujuan untuk memakai uang tersebut dalam rangka melaksanakan suatu perkawinan yang

dimulai dari persiapan sampai dilangsungkannya perkawinan itu. Jadi, *uang panaik* itu digunakan untuk memenuhi segala biaya-biaya pihak keluarga perempuan yang melaksanakan pesta perkawinan.

Sedangkan di masyarakat Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone pada khususnya bahwa salah satu tujuan *uang panaik* itu adalah untuk mengadakan walimah, yang biasanya sebahagian masyarakat, walimah itu dijadikan suatu pesta yang meriah, yang berlebih-lebihan dan ia merasa malu di hadapan masyarakatnya kalau tidak melaksanakan dengan meriah.

Selain *uang panaik* itu digunakan untuk pesta perkawinan, biasanya juga digunakan untuk memperbaiki rumah dan melengkapi perabotnya. Sehingga dengan sendirinya akan menuntut *uang panaik* yang cukup tinggi kepada pihak laki-laki yang meminang anak gadisnya, dengan maksud agar walimahnyapun dapat dilaksanakan dengan semeriah mungkin, tanpa melihat lagi kemampuan pihak laki-laki.

Dalam pelaksanaan walimah semacam ini berarti ia mengikuti adatnya, sebab pelaksanaan walimah semacam ini tidak ada tuntunannya baik dalam al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW.

Hal ini tidak berarti tidak sesuai lagi dengan tujuan walimah yakni dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan sesederhana mungkin, sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW.

Jadi, tujuan utama uang belanja adalah melaksanakan walimah yang sesuai dengan konsep Islam yaitu dengan menyederhanakan bentuk walimah dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, artinya tidak ada unsure-unsur memaksakan

diri, sehingga dengan demikian akan mudah terlaksananya suatu perkawinan, tanpa menuntut *uang panaik* yang terlalu tinggi.

C. Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Islam

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.³

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kemuka bumi untuk menjadi *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), Islam tidak hanya sekedar mengatur masalah ibadah seseorang hamba kepada Tuhan-Nya, tetapi juga mampu menjawab berbagai macam bentuk tantangan pada setiap zaman, termasuk dalam persoalan ekonomi, yang dikenal pada saat ini dengan istilah Ekonomi Islam.

Kemunculan ekonomi Islam dipandang sebagai sebuah gerakan baru yang disertai dengan misi dekonstruksi atas kegagalan system ekonomi dunia dominan selama ini.⁴

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-'iqtsad*, yang secara bahasa berarti: kesederhanaan dan kehematan. Dari makna ini, kata *al-*

³Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.

⁴ Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) h.1

iqtisad berkembang dan meluas sehingga mengandung makna '*ilm al-iqtisad*, ilmu yang berkaitan dengan atau membahas ekonomi.⁵

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang *apriori* (*apriori judgement*), benar atau salah harus diterima.⁶

Sedangkan secara terminologis, para pakar berbeda pendapat dalam mendefinisikan ekonomi Islam:

- a. M. Umer Chapra: Ekonomi Islam adalah “suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka sesuai dengan *maqasid al-syari'ah* atau tujuan ditetapkannya syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial jalinan moral dan masyarakat.⁷

⁵ Dr. H. Muslimimin Kara, M.Ag, *Pengantar Ekonomi Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2009) h. 1

⁶ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2006, h. 6

⁷ M. Umer Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh Amdiar Amin dkk, “Landscape Baru Perekonomian Masa Depan”, (Jakarta: SEBI, 2001 h. 131

- b. Menurut Mohammad Nejatullah Siddiqi, ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh al-Qur'an dan Sunnah Nabi, akal pikiran, dan pengalaman.⁸
- c. M. Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam dengan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam.⁹
- d. Menurut Yusuf al-Qardhawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.¹⁰
- e. Khurshid Ahmad mendefinisikan ekonomi Islam dengan suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya kepada persoalan tersebut menurut perspektif Islam.¹¹

Masih banyak lagi para ahli yang memberikan definisi tentang apa itu ekonomi Islam. Sehingga ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan

⁸Mohammad Nejatullah Siddiqi, "History of Islamic Economic Thought" dalam M. Umer Chapra, *Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*, terjemah oleh Amdiar Amin dkk. (Jakarta: SEBI, 2001 M) h. 146

⁹M. Abdul Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice* (Cambridge: The Islamic Academy, 1986 M) h. 18

¹⁰Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan (Jakarta: Gema Insani Press, 1997 M.) h. 31

¹¹Khurshid Ahmad, "Nature and Significance of Islamic Economic" dalam M. Umer Chapra, *Landscape Baru*, h. 146

tuntutan syariah Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).¹²

Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas yang relatif dapat secara lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif adalah yang dirumuskan oleh Hasanuzzaman yaitu:

"Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat (*Islamic economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the shari'ah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society*).¹³

Hal penting dari definisi tersebut adalah istilah "perolehan" dan "pembagian" di mana aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber ekonomi. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari ketidakadilan tersebut adalah syariah yang di dalamnya terkandung perintah (*injunctions*) dan peraturan (*rules*) tentang boleh tidaknya suatu kegiatan.

1. Hakekat Ekonomi Syariah

Dalam berbagai pengertian ekonomi, baik yang dikemukakan oleh ekonomi Barat maupun oleh pakar ekonomi syariah sendiri menempatkan individu (manusia)

¹² Manajemen Dakwah, "Pengertian Ekonomi Islam" Artikel diakses pada tanggal 5 Januari 2017 dari <http://md-uin.blogspot.com/2009/007/pengertian-ekonomi-islam.html>

¹³ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006), h. 8

sebagai obyek kajian ekonomi. Namun demikian, konsep ekonomi syariah tidak hanya mengkaji individu sebagai makhluk sosial, sebagaimana yang menjadi kajian ekonomi Barat, tapi lebih dari itu. Konsep ekonomi syariah juga menempatkan individu sebagai makhluk yang mempunyai potensi religious. Oleh sebab itu, dalam pemenuhan kebutuhannya, atau aktifitas ekonomi lainnya, ekonomi syariah menempatkan nilai-nilai Islam sebagai dasar pijakannya. Berbeda dengan konsep ekonomi Barat yang menempatkan kepentingan individu sebagai landasannya.

Nilai-nilai Islam tidak hanya berkaitan dengan proses ekonomi tapi juga berkaitan dengan tujuan dari kegiatan ekonomi. Islam menempatkan bahwa tujuan ekonomi tidak hanya kesejahteraan duniawi saja, tapi juga untuk kepentingan yang lebih utama yaitu kesejahteraan ukhrawi.¹⁴

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Para pemikir ekonomi syariah berbeda pendapat dalam memberikan kategorisasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi syariah pada: Prinsip *tauhid*, *rububuyyah*, *khilafah*, dan *tazkiyah*. Mahmud Muhammad Babali menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: al-ukhuwwah (Persaudaraan), al-Ihsan (berbuat baik), al-nasihah (memberi nasihat), al-istiqamah (teguh pendirian), dan al-taqwa (bersikap takwa). Dan masih banyak lagi pendapat lainnya, namun dari

¹⁴ Dr. H. Muslimimin Kara, M.Ag, *Pengantar Ekonomi Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2009) h. 2

berbagai kategorisasi di atas, pada dasarnya bahwa prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah, sebagai berikut:¹⁵

a. Prinsip Tauhid

Tauhid dalam ajaran Islam merupakan suatu yang sanga fundamental dan bahkan misi utama para rasul Allah kepada umat manusia adalah dalam rangka penyampaian (*tablig*) ajaran tauhid, yaitu menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan tuhan serta berserah diri kepada-Nya, sekaligus sebagai tujuan utama kenabian. Para nabi dan rasul diutus dimuka bumi ini dalam rangka mengajak umat manusia untuk bersikap mengesakan Allah swt. Nabi Muhammad saw. dalam rangka mendakwakan Islam, ajaran tauhid merupakan ajaran dasar yang pertama kali ditanamkan pada diri umatnya, sebelum syariah maupun lainnya diajarkan.

Prinsip tauhid dalam ekonomi syariah sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaannya, (hubungan horisontal), sama pentingnya dengan hubungan dengan Alah (hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Alquran.

b. Prinsip keseimbangan

Kegiatan ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat.

¹⁵DR. Amiruddin K., M.El, Dasar-dasar Ekonomi Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2014) h. 37-42

Pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat dilakukan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut. Islam menolak secara tegas umat manusia yang terlalu rakus dengan penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan ekonomi.¹⁶ Sebagaimana yang menjadi tujuan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Melupakan salah satu aspek kesejahteraan di atas berarti menutup jalan kepada pencapaian kesejahteraan yang sejati.

Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan dipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁷

c. Prinsip Khilafah

Manusia adalah khalifah (wakil) tuhan di muka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi “mandat” kekhalifahan, Allah swt. Untuk mendukung tugas kekhalifahan tersebut manusia dibekali dengan berbagai kemampuan dan potensi spiritual. Disamping disediakan sumber material yang memungkinkan pelaksanaan misi itu dapat tercapai secara efektif.

Menurut M. Umer Chapra, ada empat faktor yang terkait dengan khilafah dalam hubungannya dengan ekonomi Islam, yaitu *universal brotherhood* (persaudaraan universal), *resource are a trust* (sumber daya alam merupakan amanat), *humble life style* (gaya hidup sederhana), dan *human freedom* (kemerdekaan manusia).¹⁸ Keempat faktor ini merupakan penyangga khilafah sebagai wahana untuk mencapai

¹⁶ M. Umer Chapra, “Negara Sejahtera Islami dan Perannya di Bidang Ekonomi”, dalam Ainur R. Sophian, *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategi Pembangunan Masyarakat Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 28

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. II; Jakarta: Siar Grafika, 2009), h. 5

¹⁸ H. Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015) h. 29

kesejahteraan kehidupan dunia dan kesejahteraan diakhirat. Persaudaraan universal yang melibatkan seluruh umat manusia karena setiap orang adalah khilafah Allah di muka bumi tanpa membedakan suku, bangsa, atau negara asal. Persaudaraan ini membawa pada kesamaan derajat (*social equity*) dan kehormatan umat manusia.

d. Keadilan ('Adl)

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian syariah. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Alquran atau sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

Nilai keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Kata adil dalam hal ini bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa. Dengan kata lain, maksud adil di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.

3. Tujuan Ekonomi Islam

Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemashlahahan yaitu

keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-'ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*), dan kelangsungan keturunan (*an-nasl*).¹⁹

Mashlahah dicapai hanya jika kehidupan manusia hidup dalam keseimbangan, diantaranya mencakup keseimbangan antara moral dan spiritual sehingga terciptanya kesejahteraan yang hakiki.

Tujuan ekonomi Islam lainnya menggunakan pendekatan antara lain:

- a. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- b. Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber yang masih terpendam.
- c. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan.
- d. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.

Secara umum tujuan ekonomi Islam adalah untuk menciptakan *al-falah* atau kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Untuk mencapai hal demikian maka manusia harus bekerja keras mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi maupun non materi

¹⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 54

(rohaniah), serta berbuat baik dengan harta yang dimilikinya dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam, berupa pelaksanaan perintahnya dan menjauhkan larangannya agar tercipta kemashlahatan yang sesungguhnya baik untuk dirinya sendiri dan orang lain.²⁰



²⁰Anwar Abbas, *Dasar-dasar Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syahid, 2009), h. 14

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat.¹ Penelitian ini, menggambarkan tentang *uang panas* dalam pandangan ekonomi Islam.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi di kecamatan Kajuara kabupaten Bone, dengan argumentasi bahwa pemilihan lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan.

B. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan historis

Pendekatan historis, yaitu suatu ilmu yang di dalamnya dibahas beberapa peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang serta pelaku dari peristiwa tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan

¹Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Pres, 1984), h.10

memahami sejarah uang panaik yang dalam penelitian ini difokuskan kepada uang panaik, hal ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana kedudukan uang panaik.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat yang tinggal di kecamatan Kajuara.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di kecamatan Kajuara kabupaten Bone dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera.²
2. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang ada di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, seperti tulisan yang berupa peraturan serta gambar atau foto sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

E. Instrumen Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran dan pengamatan, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Peneliti sendiri sebagai instrument dalam penelitian

²Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.

³Esterbg, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 97.

kualitatif. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data yang dianggap penting.
3. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan, dengan adanya foto dan rekaman ini maka dapat meningkatkan keabsahan akan lebih terjamin.
4. Perekam Suara berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan. Penggunaan perekam suara dalam wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis data interaktif (interactive model of analysis) dari Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data merupakan kegiatan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan terhadap masalah penelitian. Data di peroleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan FGD.
2. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrasian dan transformasi data "kasar" yang muncul di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa, hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Sajian data merupakan sekumpulan informasi yang Memberikan kemungkinan adanya penerikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat sajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan yang memungkinkan untuk menganalisis dan mengambil tindakan lain berdasarkan pemahaman.
4. Penarikan kesimpulan hal ini dilakukan sejak mulai pengumpulan data, dengan penanganan secara longgar, tetap terbuka dan skeptis. Tidak ada kesimpulan akhir sampai proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan diverifikasi adalah yang berupa suatu penggolongan sebagai pikiran kedua yang timbul melintas peneliti pada waktu menulis, verifikasi yang dapat dilakukan dengan jauh lebih teliti seperti berdiskusi atau saling memeriksa teman.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian*

Kecamatan Kajuara adalah salah satu kecamatan yang berada dikabupaten Bone bagian Selatan, yang jaraknya kurang lebih 60 Km dari kota Watampone. Kecamatan Kajuara mempunyai delapan belas (18) desa dan keluarahan. Adapun batas daerah atau wilayah kecamatan yaitu:

- a. Sebelah utara Kecamatan Salomekko
- b. Sebelah Timur Teluk Bone
- c. Sebelah selatan Kecamatan Sinjai
- d. Sebelah barat Kecamatan Kahu

Untuk berkunjung atau datang ke Kajuara dengan melewati berbagai kecamatan-kecamatan diantaranya kecamatan Cina, Kecamatan Barebbo, kecamatan Mare, kecamatan Tonra, kecamatan Salomekko dan akhirnya tiba dikecamatan Kajuara. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan, daratan dan pantai, desa yang terjauh dari ib kota kecamatan adalah desa Raja dan kalero jaraknya 17 km, desa yang tersulit dijangkau adalah desa Lappa Bosse, desa Kalero dan Massangkae, karena jalan yang dilalui jalan tanah dan berbatu, khusus desa Massangkae bisa juga melalui laut melalui kabupaten Sinjai, sedangkan desa lainnya baik karena jalannya beraspal dan pengerasan, 10 desa berada di pinggir pantai yang berbatasan dengan Teluk Bone.

Kecamatan Kajuara ini sebagian besar warganya mempunyai mata pencaharian sehari-hari sebagai nelayan, petani dan pegawai bahkan sebagian juga banyak yang merantau ke Malaysia, termasuk wilayah Kalimantan. Wilayah kecamatan Kajuara ini meski tergolong sebagian wilayah pesisir, tetapi kehidupan sosial masyarakatnya sudah tergolong makmur dan modern, terlihat dari rumah kayu dan batu yang lumayan mewah disekitar Kecamatan Kajuara.

B. Proses Terjadinya Perkawinan

Sebagai suatu komunitas atau kelompok manusia masyarakat kecamatan Kajuara kabupaten Bone juga melaksanakan perkawinan, perkawinan yang mereka laksanakan sebagaimana layaknya dilaksanakan oleh kelompok masyarakat lainnya.

Perkawinan bagi masyarakat kecamatan Kajuara merupakan sesuatu yang penting, oleh karena mereka melakukannya dengan suatu sistem tertentu. Sistem yang dimaksud adalah prosesi sebuah perkawinan. Dengan sistem atau prosesi itu timbul kesan kesucian dan kesakralannya.

Agama Islam dalam masalah perkawinan sangat menganjurkan untuk dimudahkan. Firman Allah swt. dalam surah an-Nur / 24 : 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمْ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

memapukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹

Ayat tersebut mengandung perintah untuk mengawinkan orang-orang yang sudah sepantasnya untuk kawin, ketegasan Allah untuk memberi rezeki kepada mereka yang fakir merupakan petunjuk bahwa dalam melangsungkan perkawinan tidak perlu ada keraguan. Disamping itu, ayat ini juga mengandung petunjuk untuk memberikan fasilitas demi terlaksananya perkawinan, karena perkawinan itu adalah jalan yang paling efektif untuk menjaga kehormatan diri, menjauhkan seorang mukmin dari berbuat zina dan dosa-dosa lainnya. Dengan demikian, membiarkan orang-orang tidak kawin dan tidak memberikan fasilitas dan kemudahan berarti membiarkan mereka untuk melakukan perbuatan dosa.

Adapun tahapan prosesi perkawinan masyarakat Kecamatan Kajuara Kabupate Bone dibagi atas 3 tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan pranikah

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini penjelasan tentang tahapan pranikah yaitu:

a. Madduta Massuro

Banyak pendahuluan yang harus dilewati sebelum pesta perkawinan (Mappabotting) dilangsungkan. Jika lelaki belum dijodohkan sejak kecil maka keluarganya akan mulai mencari-cari pasangan yang kira-kira dianggap sesuai untuknya. Bagi kaum bangsawan, garis keturunan perempuan dan laki-laki akan

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pusaka Indonesia, 2012), h. 494

diteliti secara seksama untuk mengetahui apakah status kebangsawanan mreka sesuai atau tidak. Karena tidak boleh tingkatan pelamar lebih rendah dari tingkat perempuan yang akan dilamar.

Madduta artinya meminang secara resmi. Dahulu kala dilakukan beberapa kali hingga ada kata sepakat, namun secara umum proses yang ditempuh sebelum meminang adalah sebagai berikut:

- 1) Mammanu'-manu bermakna sebagai burung yang terbang kesana kemari, untuk menyelidiki apakah ada gadis yang berkenan dihati. Langkah pendahuluan ini biasanya ditugaskan kepada seseorang biasanya kepada paruh baya perempuan yang akan melakukan kunjungan biasa kepada keluarga perempuan untuk mencari tahu seluk beluknya, namun biasanya proses ini sangat tersamar. Mappese-pese dilakukan setelah kunjungan pertama tadi, yaitu melakukan kunjungan resmi pertama untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang secara tidak langsung dan sangat halus agar kedua belah pihak tidak kehilangan muka atau malu jika pendekatan ini tidak membuahkan hasil.
- 2) Madduta yaitu jika keluarga perempuan memberi lampu hijau, kedua belah pihak kemudian menentukan hari untuk mengajukan lamaran secara resmi (Madduta). Selama proses lamaran ini berlangsung garis keturunan, status kekerabatan, dan harta calon mempelai diteliti lebih jauh, sambil membicarakan sompa dan uang antaran (dui menre) yang harus diberikan

oleh pihak laki-laki untuk biaya perkawinan pasangannya, serta hadiah persembahan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya.

Dalam kaitan masa madduta ini, H. Abdullah Samad berkomentar sebagai berikut:

“Besar kecilnya uang panaik ini tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, namun tidak dapat pula disangkal bahwa masalah uang panaik yang sangat tinggi, sehingga perkawinan sering tidak dapat terlaksanakan hanya karena tidak terpenuhinya uang panaik itu sesuai yang dituntut oleh pihak keluarga perempuan. Jika sudah sepakat dengan uang panaik, maka selanjutnya baru dibicarakan masalah mahar.”²

- 3) Mappettu Ada, biasanya juga ditindaklanjuti dengan mappasierekeng atau menyimpulkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibicarakan bersama pada proses sebelumnya. Ini sudah merupakan lamaran resmi atau disaksikan biasanya oleh keluarga dan kerabat. Pada saat inilah akan dibicarakan secara terbuka segala sesuatu terutama mengenai hal-hal yang prinsipil. Pada kesempatan ini diserahkan oleh pihak laki-laki Pattenre ada atau Passio (pengikat) berupa cincin.

b. Mappaisseng atau memberi kabar

Setelah kegiatan Madduta atau peminangan telah selesai dan menghasilkan kesepakatan, maka kedua pihak keluarga calon mempelai akan menyampaikan kabar

²H. Abdullah Samad, Pegawai Negeri Sipil, “Wawancara”, di Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, tanggal 20 Juni 2017

mengenai perkawinan ini. Biasanya yang diberi tahu adalah keluarga yang sangat dekat, tokoh masyarakat yang dituakan, serta tetangga-tetangga dekat, berhubungan mereka inilah yang akan mengambil peran terhadap kesuksesan semua rangkaian upacara perkawinan ini.

c. Mattampa / Mappalettu Selleng

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya yaitu Mappaisseng dan biasanya pihak keluarga calon mempelai akan mengundang seluruh sanak saudara dan kerabat-kerabat. Undangan tertulis ini dilaksanakan kira-kira 1 atau 2 minggu sebelum resepsi perkawinan dilaksanakan. Kegiatan tertulis ini disebut juga Mappalettu Selleng karena diharapkan pihak yang diundang akan merasa dihargai bila para pembawa undangan ini menyampaikan salam dan harapan dari pihak yang mengundang kiranya berseia datang untuk memberi restu.

d. Mappatettong Sarapo / Baruga

Sarapo / Baruga adalah bangunan tambahan didirikan disamping kiri atau kanan rumah yang akan ditempati melaksanakan akad nikah. Sedangkan baruga adalah adalah bangunan terpisah dari rumah yang ditempati bakal pengantin dan dindingnya terbuat dari jalinan bambu yang dianyam yang disebut Walasuji. Di dalam sarapo atau baruga dibuatkan pula tempat yang khusus bagi pengantin dan kedua orang tua mempelai yang disebut Lamming. Tetapi akhir-akhir ini Kabupaten Bone sudah jarang lagi mendirikan Sarapo oleh karena sudah ada beberapa gedung atau tenda yang disewakan lengkap dengan peralatannya namun kadang pula masih ada yang melaksanakan terutama bagi kalangan bangsawan dan orang berada.

e. Mappacci / Tudampenni

Upacara adat Mappacci dilaksanakan pada waktu tudampenni, yaitu menjelang acara akad niah / ijab qabul keesokan harinya. Upacara Mapacci adalah salah satu upacara adat Bugis yang dalam pelaksanaannya menggunakan daun pacar atau Pacci. Sebelum kegiatan dilaksanakan biasanya terlebih dahulu dilakukan acara Mappanre Temme (Katam al-Qur'an) dan Barasanji. Daun Pacci ini dikaitkan dengan kata Pacci yang maknanya adalah kebersihan dan kesucian. Dengan demikian pelaksanaan Mappacci mengandung makna kebersihan raga dan kesucian jiwa.

Hal ini dapat kita lihat sesuai yang diuraikan oleh Nuraeni, yaitu:

“Dalam bahasa Bugis perkataan Pacci dihubungkan dengan kata Pacing, artinya bersih. Baik bagi orang Bugis maupun orang Makassar, pacar itu didasarkan kepada kualitatifnya, pacar itu mempunyai sifat-sifat magis yang dipakai sebagai lambang kebersihan atau kesucian, jadi tidaklah dipakai pada sembarang waktu. Oleh sebab itu, maka orang menggunakan pacar (Pacing), selain pada waktu mau kawin (nikah), juga dahulu kala dipakai dalam rangka penyambutan bulan suci Ramadhan.”³

Lain hal yang diungkapkan Marjun, yaitu:

“Sesuai dengan kebiasaan masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di kabupaten Bone, pada saat upacara Mappacci kedua belah pihak tidak boleh saling bertemu. Oleh karena itu, upacara Mappacci dilakukan dirumah masing-masing

³Nuraeni, Tokoh Masyarakat, "Wawancara", di Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, tanggal 20 Juni 2017

mempelai sehari sebelum bersanding dipelaminan. Upacara ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang masih gadis dan bujangan.”⁴

2. Tahapan Nikah

Upacara akad nikah juga memiliki beberapa rangkaian acara yang secara beruntun, kegiatan yang dimaksud yaitu:

a. Mappenre Botting

Merupakan kegiatan mengantar pengantin laki-laki kerumah pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah.

b. Madduppa Botting

Diartikan menjemput kedatangan pengantin laki-laki. Sebelum pengantin laki-laki berangkat kerumah perempuan biasanya dibicarakan terlebih dahulu rombongan tersebut menunggu penjemput dari pihak perempuan.

c. Akad Nikah

Orang yang bersiap melakukan akad nikah adalah bapak atau wali calon mempelai perempuan atau imam kampung atau salah seorang yang ditunjuk oleh Departemen Agama. Dua orang saksi dari kedua belah pihak. Setelah akad nikah selesai, maka dilanjutkan dengan acara Mappasiluka atau Mappasikarawa. Acara ini merupakan kegiatan mempertemukan mempelai laki-laki dengan pasangannya. Pengantin laki-laki diantar oleh seseorang yang dituakan oleh keluarganya menuju kamar pengantin perempuan. Mempelai pria menyentuh tangan atau anggota badan

⁴Marjuni, Tokoh Masyarakat, ”*Wawancara*”, di Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, tanggal 30 Juni 2017

mempelai perempuan yang dianggap mempunyai makna tersendiri bagi kedua mempelai, biasanya pada daerah ubun-ubun, leher dan dada.⁵

3. Tahapan Sesudah Akad Nikah

Adapun upacara setelah akad nikah yaitu

a. Mapparola

Acara ini merupakan prosesi penting dalam rangkaian perkawinan adat Bone, yaitu kunjungan balasan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Jadi merupakan suatu kekurangan, apabila seseorang atau mempelai wanita tidak diantar kerumah orang tua mempelai laki-laki. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan sehari atau beberapa hari setelah upacara akad nikah dilaksanakan, biasanya tidak dilaksanakan apabila pernikahan tersebut tidak mendapat restu dari kedua orang tua mempelai.

b. Marola Wekka Dua

Mempelai perempuan biasanya bermalam satu malam saja dan sebelum matahari terbit kedua mempelai harus kembali kerumah mempelai perempuan.

c. Ziarah Kubur

Meskipun banyak pihak yang mengatakan bahwa ziarah kubur bukanlah merupakan rangkaian upacara perkawinan adat Bone namun sampai saat ini kegiatan tersebut masih sering dilakukan karena merupakan tradisi atau adat kebiasaan bagi masyarakat Bone, yaitu lima hari atau seminggu setelah kedua belah pihak melaksanakan upacara perkawinan.

⁵Andi Nurnaga, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis* (Makassar: CV. Telaga Zamzam, 2001), h. 61

d. Cemme-cemme atau Mandi-mandi

Acara ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Bone bahwa setelah upacara perkawinan yang banyak menguras tenaga dan pemikiran maka rombongan dari kedua belah pihak pergi mandi-mandi disuatu tempat wisata.

C. *Kedudukan Uang Panaik ditinjau dari Hukum Adat di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone*

Perkawinan dalam Islam merupakan sarana efektif untuk menjaga umat manusia dari kebobrokan moral, menjaga setiap individu dari kerusakan masyarakat sebab manusia mempunyai naluri yang cukup mencintai lawan jenisnya, dapat disalurkan lewat pernikahan yang formal, yaitu hubungan yang halal.⁶ Itulah sebabnya Rasulullah saw. khususnya bagi kaum muda agar tidak terbelenggu dalam jurang kenistaan sehingga ia menganjurkan perkawinan sebagaimana sabdanya sebagai berikut

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمَنْى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَخَلَا فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكَرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا، أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَّا لَيْنُ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁶Thoriq Ismail, *Az-Zuwajul Islami*, Diterjemahkan oleh Zainuddin Mz, Mahrous Ali dan H. Abdullah dengan judul “Pernikahan” (Cet. I; Surabaya Pustaka Progressif, 1994), h. 14.

Artinya:

Alqamah berkata: Ketika aku bersama Abdullah bin Mas'uud di Mina tiba-tiba bertemu dengan Usman, lalu dipanggil: Ya Aba Abdirrahman, saya ada hajat padamu, lalu berbisik keduanya: Usman berkata: Ya Aba Abdirrahman, sukakah anda saya kawinkan dengan gadis untuk mengingatkan kembali masa mudamu dahulu. Karena Abdullah bin Mas'uud tidak berhajat kawin maka menunjuk kepadanya dan dipanggil: Ya Alqamali, maka aku daiang kepadanya, sedang ia berkata: Jika anda katakan begitu maka Nabi saw. bersabda kepada kami: Hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa. (Bukhari, Muslim).⁷

Hadis tersebut menganjurkan umatnya melakukan suatu perkawinan apabila telah mampu. Sebagian ulama mengatakan ada dua macam kemampuan, yakni kemampuan memberi nafkah batin antara lain senggama dan kemampuan memberi nafkah lahir antara lain nafkah rumah tangga. Apabila seorang pemuda telah memiliki dua kemampuan ini, maka hendaklah dia menikah. Jadi apabila uang panaik yang cukup tinggi mengakibatkan tak terlaksanakannya perkawinan, karena di luar kemampuan seorang laki-laki banyak yang enggan kawin akibat terlalu tingginya uang panaik yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan perkawinan. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam yakni menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan yang tidak menyulitkan kedua belah pihak.

Proses perkawinan tiap-tiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas, baik dari segi latar belakang budaya perkawinan tersebut, maupun dari segi kompleksitas perkawinan itu sendiri. Oleh karena dalam perkawinan yang terjadi

⁷Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim li al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi* (Cet. I; Jakarta: Pusaka As-Sunnah, 2010), h. 703

bukan hanya sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai. Lebih dari itu, ada nilai yang tidak lepas untuk dipertimbangkan dalam perkawinan, seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga laki-laki dan perempuan. Kompleksitas perkawinan pada masyarakat bugis merupakan nilai-nilai yang tak lepas untuk dipertimbangkan dalam perkawinan.

Perkawinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan kebudayaan masyarakat bugis. Dalam adat perkawinan masyarakat bugis memiliki tradisi yang paling kompleks dan melibatkan banyak emosi. Bagaimana tidak, mulai dari ritual lamaran hingga selesai resepsi perkawinan akan melibatkan seluruh keluarga yang berkaitan dengan kedua pasangan calon mempelai. Salah satu tradisi tersebut adalah adanya kewajiban memberikan *uang panaik* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat terlaksananya perkawinan.

Tentang sejarah awal mulanya *uang panaik* perkawinan dalam adat perkawinan suku Bugis dapat dilihat hasil wawancara penulis dengan seorang tokoh masyarakat sebagai berikut ini :

“*Uang panaik* dalam adat perkawinan suku Bugis mulai berlaku sekitar tahun 1950, pada waktu itu yang memberlakukan *uang panaik* tersebut hanya terbatas pada kaum bangsawan saja. *Uang panaik* tersebut dimaksudkan untuk memeriahkan pesta perkawinan serta menunjukkan kebangsawanan mereka, makin semarak pesta perkawinan yang diselenggarakan, maka makin dikagumilah bangsawanan tersebut. Demikianlah hingga akhirnya kebiasaan para bangsawan memberlakukan adanya *uang panaik* jika mengawinkan anak-anak mereka akhirnya lambat laun diikuti oleh seluruh anggota masyarakat dan tetap berlaku sampai sekarang”.⁸

⁸ H. Abdullah Samad, Pegawai Negeri Sipil, “*Wawancara*”, di Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, tanggal 2 Februari 2017

Hal lain dikemukakan oleh H. Abdullah Samad, salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Kajuara bahwa

“*Uang panaik* sejak adanya perkawinan dalam masyarakat bugis. Setelah Islam datang dan ajarannya tersebar di tengah masyarakat termasuk kewajiban memberikan mahar dalam perkawinan, maka *uang panaik* ini tidak serta merta dihapus, akan tetapi tetap dipertahankan sehingga muncullah dua kewajiban yang masing-masing harus dipenuhi oleh mempelai pria yaitu mahar sebagai kewajiban agama dan *uang panaik* sebagai kewajiban adat”.⁹

Kalau melihat hasil wawancara kedua di atas, sangatlah berbeda. Hasil wawancara yang pertama menyebutkan dengan jelas kapan berlakunya uang belanja tersebut, sedangkan hasil wawancara yang kedua hanya memperkirakannya. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa *uang panaik* tersebut memang sudah ada sejak dulu yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai wujud dalam berpegang teguh kepada adat istiadat.

Secara sederhana, *uang panaik/doi balanja* (Makassar) atau *dui” menre”* (Bugis) atau uang belanja, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. *Uang panaik* ini tidak terhitung sebagai mahar perkawinan, melainkan kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang telah disepakati oleh keluarga kedua belah

⁹ Marjuni, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, di Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, tanggal 7 Januari 2017

pihak dan menjadi penentu berlanjutnya rencana perkawinan ke tahap selanjutnya.

Uang panaik tersebut ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan.¹⁰

Fenomena jumlah pemberian *uang panaik* yang tinggi sehingga menghasilkan sebuah pesta perkawinan yang mewah sebenarnya hanya berlaku bagi keluarga kerajaan atau golongan bangsawan, namun sekarang mengalami pergeseran dan mulai dipraktekkan masyarakat umum Suku Bugis. Dalam hukum Islam memang tidak ada kewajiban memberikan *uang panaik*. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum Islam hanyalah mahar sebagai bukti cinta kasih suami kepada istrinya. Sedangkan pemberian wajib *uang panaik* adalah tradisi adat bugis saja.

Seperti yang dilakukan Nabi Muhammad saw. pada saat menikahi Siti Khadijah, beliau memberikan mahar sebanyak 500 dirham, sesuai dengan hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ص؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً وَنَشَأً. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشْءُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نَصْفُ أَوْقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةٍ دِرْهَمٍ. الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبَخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ

Artinya:

Dari Abu Salamah, ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Aisyah, “Berapakah mahar Rasulullah SAW”. Ia menjawab, “Mahar beliau kepada

¹⁰ M. Fremaldin, “Fenomena *Uang Panaik* dalam Perkawinan Bugis Makassar”, dalam <http://beritadaerah.com/article> (16 januari 2012)

isteri-isterinya adalah dua belas uqiyah lebih satu nasy”. Aisyah bertanya, “Tahukah kamu apakah nasy itu?”. Aku menjawab, “Tidak”. Aisyah berkata, “Setengah uqiyah, jadi seluruhnya sama dengan lima ratus dirham”. [HR. Jamaah kecuali Bukhari dan Tirmidzi]¹¹

Dari hadis diatas dapat kita simpulkan bahwa kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon istri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki. Islam tidak menetapkan jumlah besar kecilnya mahar. Oleh karena itu, dalam menyerahkan mahar berdasarkan kemampuan masing-masing, atau keadaan dan tradisi keluarganya.

Berbeda dengan *uang panaik* dalam masyarakat yang dikenal dengan nama *Doi' menre/doi balanca*, yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum perkawinan dilaksanakan tidak pernah di temukan dalam al-Qur'an dan hadis. Hal ini berarti suatu kata yang lahir dari adat istiadat suatu suku, dimana kata uang panaik sering ditemui dan dengarkan dalam adat Bugis-Makassar. Khususnya masyarakat di kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, apabila terjadi suatu pelaksanaan perkawinan, tanpa adanya sejumlah *uang panaik* tersebut maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Sumber *uang Panaik* yaitu berasal dari adat istiadat suku Bugis, maka sangat disesalkan jika hanya karena *uang panaik* yang terlalu tinggi yang tidak mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki, dengan maksud pihak laki-laki itu hanya ingin menurut

¹¹Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim li al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi*, h. 735

hawa nafsunya untuk melaksanakan suatu pesta perkawinan yang semeriah mungkin, karena ia tidak mau kalah dengan orang yang ada disekitarnya dan merasa malu kalau uang panaiknya sedikit, sehingga biasanya perkawinan gagal hanya karena tidak terpenuhinya uang panaik tersebut.

Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *uang panaik* yang di targetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat.

Sesuai yang dikatakan Drs. A. M. Anwar Syamsu, MM bahwa:

“Khusus di kecamatan Kajuara kabupaten Bone pada saat acara Madduta(pelamaran) yang pertama kali dibahas adalah *Uang Panaik*. Karena dari sisi adat *uang Panaik* itu wajib. Dan yang selalu dipermasalahkan adalah *uang Panaik* bukan mahar karena itu sudah menjadi pemahaman budaya.”¹²

Satu hal yang harus dipahami bahwa *uang panaik* yg diserahkan oleh calon suami diberikan kepada orang tua calon istri, sehingga dapat dikatakan bahwa hak mutlak pemegang *uang panaik* tersebut adalah orang tua si calon istri. Orang tua mempunyai kekuasaan penuh terhadap uang tersebut dan begitupun penggunaanya. Penggunaan yang dimaksud adalah membelanjakan untuk keperluan pernikahan mulai dari penyewaan gedung atau tenda, menyewa grup musik atau masyarakat

¹² Anwar Syamsu, Kepala KUA Kecamatan Kajuara, "Wawancara", di Kantor KUA Kecamatan Kajuara, tanggal 3 Juli 2017

setempat menyebutnya *electone*, membeli kebutuhan konsumsi dan semua yang berkaitan dengan jalannya resepsi perkawinan.

Mengenai pesta perkawinan ini, sebagaimana yang dikemukakan Ibu Nuraeni yaitu

“Mereka menuntut *uang panaik* yang tinggi dengan maksud untuk melaksanakan pesta yang meriah. Bahkan juga biasanya diadakan pertandingan domino sehari sebelumnya walimah dilaksanakan dengan tujuan untuk lebih menyemarakkan acaranya. Kemudian pada hari diadakannya pesta biasanya dilengkapi dengan orkes melayu, sebab ia tidak mau ketinggalan pestanya dengan mengambil orkes”.¹³

Adapun kelebihan *uang panaik* yang tidak habis terpakai akan dipegang oleh orang tua. Akan tetapi pada umumnya semua *uang panaik* tersebut akan habis terpakai untuk keperluan pesta pernikahan, namun apabila terdapat sisa dari total *uang panaik* tersebut maka akan diberikan kepada anak. Bagian anak pun terserah orang tuanya. Apakah akan memberikan semuanya atau tidak, itu menjadi otoritas orang tua si calon istri. Walaupun dalam kenyataanya orang tua tetap memberikan sebagian kepada anaknya untuk dipergunakan sebagai bekal kehidupannya yang baru.

Akan tetapi, Bapak M. Syakir S. Ag, selaku Imam Desa Buareng yang penulis tanyai pendapatnya mengenai *uang panaik* ini punya pendapat menarik dan bijaksana. Menurutny:

¹³ Nuraeni, Tokoh Masyarakat, “Wawancara”, di Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, tanggal 17 Januari 2017

“Perlu dibedakan *uang panaik* dengan mahar. Kalau *uang panaik* sebagai pengganti biaya pernikahan saya kira wajar selama itu sepadan dengan biaya yang dibutuhkan. Yang biasa dan bisa bikin mahal *uang panaik* itu karena ada korelasi antara besaran pesta dengan status sosial keluarga mempelai. Semakin tinggi status sosial seseorang tentu akan berupaya membuat pesta sebesar dan semewah mungkin. Itu pemikiran dasarnya.”¹⁴

Menurut Drs. A. M. Anwar Syamsu, MM Kepala KUA Kecamatan Kajuara, *uang panaik* saat ini sebenarnya telah bergeser makna. Menurutny, selain sebagai simbol harga diri (*siri'*) wanita yang akan dinikahi, juga merupakan representasi dari harga pesta perkawinan yang akan diselenggarakan. Menurut Drs. A. M. Anwar Syamsu, MM:

“*Uang panaik* ini adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja pernikahan lainnya. *Uang panaik* ini tidak terhitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat, namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga.”

Mengamati apa yang diungkapkan oleh pak Drs. A. M. Anwar Syamsu, MM, maka seharusnya jumlah *uang panaik* tidak semahal sekarang ini. Seharusnya, *uang panaik* merepresentasikan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pesta perkawinan.

Islam sangat menghendaki meluaskan jalan dan kesempatan kepada sebanyak mungkin laki-laki dan perempuan untuk menempuh hidup suami-istri agar masing-masing dapat menikmati hubungan yang halal dan baik, untuk mencapai hal ini tidak lain dari pada harus memberikan jalan yang mudah dengan saran yang praktis sehingga orang yang fakir yang sulit mengeluarkan biaya yang besar, padahal mereka

¹⁴M. Syakir, S.Ag, Imam Desa Buareng, Wawancara, tanggal 5 Juli 2017

merupakan jumlah yang terbanyak dari umat manusia yang mampu berumah tangga. Oleh karena itu, Islam tidak menyukai mahar yang terlalu banyak apalagi uang Panaik.

Lain hal dengan di atas, segala pelaksanaan dalam Islam dianjurkan ekonomis, termasuk dalam biaya pelaksanaan resepsinya. Namun kebanyakan manusia sekarang telah berpaling dari ajaran Islam yang benar, sehingga yang dijadikan dalam mengawinkan anak perempuannya hanya karena materi, bagaikan seorang pedagang yang memandang dagangannya, mengaharap aku mahal dan untung besar sehigga tanpa emmandang norma-norma akhlak. Nilai-nilai agama yang justru dibutuhkan demi kebaikan rumh tangga dan juga memperkuat tonggak rumah tangga seorang muslim.

D. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Uang Panaik dalam Perkawinan Adat di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone

Adat pemberian *uang panaik* diadopsi dari adat perkawinan suku bugis asli. *Uang panaik* bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai penghormatan. Penghormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *uang panaik* tersebut. Fungsi *uang panaik* yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena *uang panaik* yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara

keseluruhan *uang panaik* merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita untuk memenuhi keperluan pernikahan.

Menurut Wawan Sukmawan SE., tentang *uang panaik* yaitu:

“*Uang panaik* sebenarnya di kalangan orang Bugis-Bone sudah menjadi adat dan kebiasaan dari dulu. Apabila menikah dengan orang Bugis Bone memang agak mahal biayanya. Hal ini memang memberatkan pihak laki-laki apalagi kalau pihak perempuan adalah turunan bangsawan. Hanya saja pada beberapa kalangan menganggapnya sebagai tanda keseriusan pihak laki-laki. Namun demikian, pada hakikatnya *uang panaik* yang banyak tersebut tetap menjadi kendala bagi pihak laki-laki. Kalau kita kembalikan keajaran Islam, maka seharusnya pihak wanita mempermudah pinangan tersebut.”¹⁵

Lain halnya yang dikatakan oleh Surnia Arif bahwa:

“*Uang panaik* adalah suatu bentuk harga diri keluarga calon mempelai wanita. Karena pernikahan adalah perhelatan akbar yang dialami manusia sekali dalam seumur hidupnya, maka saya menganggap bahwa pernikahan harus diselenggarakan semeriah mungkin. Namun terlepas dari itu, sebagai seorang muslim yang sekaligus hidup dalam budaya adat yang masih kental, kita harus senantiasa mengetahui bahwa budaya boleh dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.”¹⁶

Dari pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa *uang panaik* yang tinggi bisa menjadi hal yang bertentangan dengan syariat Islam ketika hal ini dilakukan secara berlebihan hingga menjadikan pernikahan sangat sulit untuk ditunaikan. Selain itu, tujuan *uang panaik* yang awalnya sebagai uang pesta, agar keluarga mempelai dapat menyelenggarakannya dengan mengundang kerabatnya kini telah bergeser makna. Karena *uang panaik* digunakan juga untuk mengundang *electone* dimana pakaian biduannya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, menyewa baju *bodo* dimana kainnya yang tipis sehingga transparan, dan terlalu berlebihan dalam hal makanan.

¹⁵Wawan Sukmawan SE, Pendamping Desa, Wawancara, tanggal 15 November 2017

¹⁶ Surnia Arif, Tokoh Masyarakat, Wawancara, tanggal 16 November 2017

Jadi dalam ekonomi Islam, *uang panaik* yang tinggi boleh-boleh saja diberikan apabila pihak laki-laki sanggup memberikan dan tidak menyusahkan pihak laki-laki.

1. Prinsip keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlibat pada berbagai spek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsimon*), dan menjahi pemborosan (*extravagance*).

Konsep nilai kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi, terutama dalam menjauhi konsumerisme dan menjauhi pemborosan berlaku tidak hanya untuk pembelanjaan yang diharamkan saja, tetapi juga pembelanjaan dan sedekah yang berlebihan.

Keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat. Oleh sebab itu, sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut. Islam menolak secara tegas umat manusia yang terlalu rakus dengan penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan ekonomi.¹⁷

Dari tulisan di atas, sudah terlihat jelas bahwa didalam islam sangat di tegaskan untuk tidak terlalu boros dalam penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan. Penulis mengangkat poin keseimbangan di dalam

¹⁷M. Umer Chapra, "Negara Sejahtera Islami dan Perannya di Bidang Ekonomi", dalam Ainur R. Sophian, *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Element Strategi Pembangunan Masyarakat Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 28

melihat kedudukan uang panaik didalam ekonomi islam karena penulis beranggapan bahwa uang (materi) tidak dapat kita simbolkan sebagai tolak ukur kehidupan manusia kedepannya, serta tidak dapat di ukur dari segi keberhasilan suatu resepsi pernikahan walaupun segala sesuatu yang di perlukan di dalam resepsi itu membutuhkan uang.

Konsep pesta adat yang dibiayai dengan *uang panaik* ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam adalah pemborosan, karena masyarakat di jaman ini mengadakan resepsi perkawinan untuk berbangga-bangga. Kita banyak menyaksikan adanya resepsi yang berlebih-lebihan, pemborosan. Bahkan, ada yang membebani diri dengan resepsi yang *uang panaik*nya di luar kemampuannya, sampai ada yang menggadaikan atau bahkan menjual hak miliknya, atau dengan mencari utang yang akan mencekik lehernya. Perbuatan demikian sebenarnya dilarang oleh agama. Allah swt. tidak mengajarkan demikian.

Islam mengatur secara jelas mengenai masalah pernikahan. Termasuk di dalamnya adanya akad nikah, serta *walimah al-'urs*. Bahwa pernikahan tidak hanya akad nikah namun perlu adanya suatu *walimah al-'urs*. Oleh sebab itu, syari'at menganjurkan supaya pernikahan tersebut dipublikasikan pada khalayak umum, dan makruh hukumnya untuk dirahasiakan. Disunnahkan mengumumkan (waktu dan tempat) prosesi akad nikah dan mengundang masyarakat sekitar, untuk membedakan antara pernikahan dan perzinaan dan perbuatan haram, karena perbuatan haram identik dengan perbuatan remang-remang.

Selain itu, jika uang panaik terlalu mahal ada beberapa dampak negatif yang bisa terjadi, yaitu:

- a. *Silariang*. Apabila orang tua laki-laki tidak dapat menyanggupi permintaan *uang panaik* dari keluarga perempuan, biasa terjadi *silariang*. Alasan mereka *Silariang* karena permintaan orang tua perempuan sangat tinggi. Disamping itu laki-laki dan perempuan saling mencintai. Jadi mereka memilih *Silariang*.
- b. Apabila *uang panaik* tinggi dan menggelar pesta yang meriah, salah satu dampaknya yaitu keluarga mempelai akan menggelar pertandingan domino sehari sebelum pesta pernikahan. Kemudian pada hari diadakannya pesta biasanya dilengkapi dengan orkes melayu, sebab ia tidak mau ketinggalan dengan mengambil orkes.

Sedangkan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. menyerukan kepada kita agar melaksanakan pesta perkawinan sesederhana mungkin sesuai dengan tujuan *uang panaik* dalam konsep Islam yaitu dengan menyederhanakan pesta perkawinan dan dilaksanakan sesuai kemampuan.

Untuk mewujudkan prinsip tersebut, penulis beranggapan bahwa pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan terlebih dahulu harus menyetujui atau menyepakati *uang panaik* yang akan diberikan pihak laki-laki yang kemudian di kembalikan setengahnya ke pihak keluarga laki-laki. Supaya terlihat seimbang dan lebih ekonomis dan supaya tidak ada yang merasa dirugikan.

Pada intinya peneliti juga menyarankan bahwa yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terdapat unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak, bagi yang tidak

mempunyai kemampuan untuk memberikan *uang panaik* dalam jumlah yang besar hendaknya jangan terlalu dipaksakan. Ditinjau dari sudut agama, Islam sebagai agama rahmat lil'alamain tidak menyukai penentuan *uang panaik* (pesta pernikahan) yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula *uang panaik* (biaya pesta) yang hanya merupakan anjuran agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah.

2. Prinsip keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, dan hak menikmati pembangunan.

Keadilan harus ditetapkan disemua fase kegiatan ekonomi, baik kaitannya dengan produksi maupun konsumsi, yaitu dengan aransemen efisiensi dan memberantas keborosan ke dalam keadilan distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar sebenarnya.

Jika Ditinjau dari poin kedua yaitu prinsip keadilan sebagaimana telah di jelaskan bahwa Nilai keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Kata adil dalam hal ini bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa. Dengan kata lain, maksud adil di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Dari penjelasan tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa keadilan didalam kehidupan bermasyarakat sangatlah di butuhkan, karena didalam kehidupan bermasyarakat sangatlah diperlukan rasa kemanusiaan yang tinggi. Dari kesadaran kemanusiaan yang tinggi inilah manusia dapat memunculkan sifat keadilan yang bisa di pakai di dalam tawar menawar *uang panaik* antara pihak pria dan pihak wanita. Tawar menawar *uang panaik* dalam segi prinsip keadilan yang di maksud penulis adalah sesuai kemampuan yang di sanggupi dari pihak laki-laki yang bisa di terima pihak perempuan atau bisa di katakan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan melalui pembicaraan kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Islam telah memberikan kemudahan kepada para pemeluknya dalam menjalankan hukum Islam sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dapat kita lihat pada ayat al-Qur'an sebagai berikut:

1. QS al-Baqarah / 2 : 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

Terjemahnya:

'Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...'¹⁸

2. QS An-Nisa / 4 : 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 61

‘Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah’.¹⁹

3. QS Al-Maidah /5 : 6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

‘Allah tidak hendak menyulitkan kamu...’.²⁰

Dengan melihat ayat-ayat dia atas, nampaklah kepada kita bahawa hukum Islam berjalan di atas kemudahan, tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. Dan perkawinan tiada lain hanya untuk melaksanakan ketetapan yang sudah menjadi Sunnatullah semenjak *azali* dan melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah swt. Karena adanya unsur mempersulit perkawinan dengan tuntutan mahar dan uang panaik yang mahal atau berbagai tuntutan yang lainnya, hal ini tidak sesuai dengan kemudahan yang dianjurkan oleh Allah swt.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa *uang panaik* adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan, di mana uang tersebut belum termasuk mahar. Menurut pandangan masyarakat suku Bugis Bone pemberian *uang panaik* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada *uang panaik* berarti tidak ada perkawinan. Karena

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 144

dari sudut pandang mereka *uang panaik* dan mahar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat suku Bugis Makassar sejak lama dan turun menurun dari satu periode ke periode selanjutnya sampai sekarang. Pada hakikatnya dalam hukum perkawinan Islam tidak ada kewajiban untuk memberikan *uang panaik*, kewajiban yang ada dalam perkawinan Islam hanyalah memberikan mahar kepada calon istri. Pemberian *uang panaik* ini merupakan adat kebiasaan yang turun temurun dan tidak bisa ditinggalkan karena mereka telah menganggap bahwa *uang panaik* merupakan suatu kewajiban dalam perskawinan. Jadi hal yang terpenting adalah mahar haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sangat sederhana sekalipun.

Telah dipaparkan di atas bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang standar minimal dan maksimal dari mahar yang harus dibayarkan oleh suami kepada calon isteri. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebihlebian dalam meminta jumlah mahar kepada suami.

Anjuran di atas merupakan perwujudan dari prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan (*raf' al-haraj*) dan mengutamakan kemudahan (*altaysir*). Dua prinsip ini merupakan prinsip universal dalam menjalankan keseluruhan syari'at Islam. Hanya saja, dalam melaksanakan hukum pernikahan prinsip tersebut jauh lebih ditekankan, dalam artian mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-

laki dengan sesuatu yang tidak kuat mereka pikul adalah pemicu kerusakan dan bencana. Di sisi lain, Islam sangat akomodatif terhadap kondisi dan kemampuan manusia. Tidak bisa dipungkiri, mereka berbeda dalam hal pendapatan, kebiasaan, tradisi dan lainnya.

Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau di luar jangkauan kemampuan seorang laki-laki, karena hal ini dapat membawa akibat negatif antara lain: pertama, menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya; kedua, mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berdampak kesedihan bagi suami isteri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak. Dampak ketiga, adalah mendorong terjadinya kawin lari.

Di samping itu, dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah banyaknya wanita yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena para lelaki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan. Lebih jauh lagi, akibat yang timbul karena besarnya tuntutan yang harus dipenuhi adalah dapat mengakibatkan para pihak yang ingin menikah terjerumus dalam perbuatan dosa.

Demikianlah, Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga.

E. Hikmah Uang Panaik

Uang panaik dalam perkawinan tidaklah sekedar ditetapkan sebagai sesuatu yang tak bermakna apa-apa. Ia memiliki makna dan hikmah yang tinggi, uang panaik merupakan dana yang digunakan untuk melaksanakan pesta perkawinan. Uang belanja yang merupakan keharusan bagi pihak laki-laki yang diserahkan kepada pihak perempuan sebagai penunjang biaya yang dikeluarkan oleh pihak perempuan. Ini berarti kedua elah pihak saling membantu dalam melaksanakan pesta perkawinan.

Tolong menolong merupakan ajaran Islam yang cukup mendasar dalam kehidupan bermasyarakat antara satu dengan yang lainnya dituntun untuk senantiasa tolong menolong dalam mengatasi berbagai kesulitan. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah swt. dalam QS al-Maidah (4) : 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah swt. sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.²¹

Ayat di atas memberikan petunjuk untuk saling menolong bila melakukan suatu kebaikan dan melarang saling menolong dalam membuat dosa dan pelanggaran. Tuntutan ini sesungguhnya merupakan jalan keluar bagi setiap orang untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dirinya. Sebab, tak satupun manusia di permukaan bumi ini yang sanggup memenuhi segala kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.

Perkawinan merupakan suatu kegiatan umat manusia yang mengandung nilai kebaikan. Perkawinan mewakili tujuan yang mulia. Karena itulah didalam pelaksanaannya dituntut untuk saling menolong. Dengan demikian, bagaimanapun beratnya pelaksanaan perkawinan itu akan dapat etratasi.



²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 141



BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dengan judul *Uang Panaik Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone*, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Kedudukan *Uang Panaik* dalam perkawinan adat Bugis adalah sebagai salah satu pra syarat, karena apabila *Uang Panaik* tidak ada, maka perkawinan tidak ada. Pemberian sejumlah *Uang Panaik* adalah pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya sebagai biaya yang digunakan dalam pesta perkawinan. Tujuannya adalah untuk menghormati keluarga pihak perempuan. Penghormatan maksudnya adalah rasa penghargaan yang diberikan kepada perempuan yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah. Juga sebagai tanda cinta kasih kepada perempuan yang ingin dinikahnya. Tingginya nilai *Uang Panaik* sangat berpengaruh oleh status sosial dalam masyarakat, pekerjaan, pendidikan, umur, keturunan, kondisi fisik, dan pendidikan. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat tingginya penentuan jumlah *Uang Panaik* yaitu batal menikah, hubungan antara kedua keluarga bisa menjadi renggang, laki-laki yang enggan menikah, perawan tua, *silariang*, bahkan bisa fatal bagi laki-laki karena dengan sengaja merusak (menghamili) perempuan yang ingin dinikahi.

2. Konsep pesta adat yang dibiayai dengan *uang panaik* ditinjau dari sudut pandang Ekonomi Islam yaitu boleh-boleh saja, apabila tidak melanggar syariat Islam dan apabila calon mempelai laki-laki sanggup memberikan dan tidak merugikan salah satu pihak.

B. Implikasi penelitian

Dalam hal ini, peneliti memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan Uang Panaik Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, yaitu:

1. Masyarakat kabupaten Bone kecamatan kajuara ketika melaksanakan serangkaian prosesi uang panai secara adat bugis Bone salah satu prosesi perkawinan ini hanyalah kebiasaan atau adat di kalangan masyarakat Bugis-makassar yang selalu dijadikan patokan walaupun bukan hal yang wajib dilaksanakan jika di pandang melalui agama. Jadi apabila dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tidak jadi masalah, yang penting rukun dan syarat perkawinan terpenuhi.

2. Terkait tentang prosesi uang panai adat bugis bone di kecamatan Kajuara seharusnya patut di jaga dan di lestarikan akan tetapi dihindari dari sikap saling memanfaatkan antara kedua mempelai, sehingga dapat di jadikan pelajaran sekaligus bukti sejarah bahwa masyarakat kabupaten bone khususnya di kecamatan kajuara. Karena di suatu daerah yang besar itu di tandai dengan kebiasaan masyarakat yang tetap melaksanakan adat istiadatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Khurshid. "Nature and Significance of Islamic Economic" dalam M. Umer Chapra, *Landscape Baru*

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Siar Grafika, 2009), Cet. 2

Al-Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan (Jakarta: Gema Insani Press, 1997 M.)

Al-Quran

Arif, Surnia, Tokoh Masyarakat, "Wawancara", tanggal 16 November 2017

Chapra, Umer, M. "Negara Sejahtera Islami dan Perannya di Bidang Ekonomi", dalam Ainur R. Sophian, *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategi Pembangunan Masyarakat Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997)

Chapra, Umer, M. *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh Amdiar Amin dkk, "Landscape Baru Perekonomian Masa Depan", (Jakarta: SEBI, 2001)

Esterbg, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002)

H. Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015)

H.S. A. Al-Hamdani, *Risalatun Nikah*, Diterjemahkan oleh Drs. Agus Salim, Dengan Judul "Hukum Perkawinan Islam" (Cet. III; Jakarta: Pustaka Amani, 1989)

Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986)

HR. Abu Dawud (No. 2117) kitab an-Nikaah, al-Hakim (11/182), ia menshahihkannya dan menilaiya sesuai syarat Syaikh al-Bukhari-Muslim, dan Syaikh al-Albani menilaiya sesuai syarat muslim. Lihat al-Irwaa' (VI/345)

HR. Ahmad (h. 24595)

<http://wijatobone.blogdetik.com/feed/>, diakses pada 3 Januari 2017

Ismail, Thoriq, *Az-Zuwajul Islami*, Diterjemahkan oleh Zainuddin Mz, Mahrous Ali dan H. Abdullah dengan judul “*Pernikahan*” (Cet. I; Surabaya Pustaka Progressif, 1994)

Kara,muslimin. *Pengantar Ekonomi Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2009)

M. Umer Chapra, “Negara Sejahtera Islami dan Perannya di Bidang Ekonomi”, dalam Ainur R. Sophian, *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategi Pembangunan Masyarakat Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997)

Mannan, Abdul, M. *Islamic Economic: Theory and Practice*, (Cambridge: The Islamic Academy, 1986 M)

Marjuni, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, di Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, tanggal 7 Januari 2017

Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)

Nuraeni, Tokoh Masyarakat, “*Wawancara*”, di Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, tanggal 17 Januari 2017

Nuraga,andi. *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis* (Makassar: CV. Telaga Zamzam, 2001)

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Drs. Moh. Thalib, dengan Judul ‘*Fiqih Sunnah*’, Jilid VII (Cet, III; Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986)

Saleh, Alam, Nur. *Sistem Upacara Perkawinan Adat Makassar di Sulawesi Selatan* (Makassar: Kanwil P, Kecamatan Suli, 1996)

Samad,abdullah. Pegawai Negeri Sipil, “*Wawancara*”, di Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, tanggal 2 Februari 2017

Siddiqi, Nejatullah, Mohammad. “History of Islamic Economic Thought” dalam M. Umer Chapra, *Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*, terjemah oleh Amdiar Amin dkk. (Jakarta: SEBI, 2001 M)

Soekanto, Soejono. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Pres,1984)

Sukmawan SE, Wawan, Pendamping Desa, “*Wawancara*”, tanggal 15 November 2017

Syamsu, Anwar, Kepala KUA Kecamatan Kajuara, ”*Wawancara*”, di Kantor KUA Kecamatan Kajuara, tanggal 3 Juli 2017

Wignjodipoero, Soerojo. *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan* (Cet. II; Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983)

Yuliadi, Imamudin. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2006



**L
A
M
P
I
R
A
N**



Lampiran-Lampiran



Foto Saat Akad Nikah di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone



Wawancara langsung Peneliti kepada H. Abdullah Samad selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone



Foto Mapparola ke rumah pengantin wanita



Wawancara langsung dengan Bapak Drs. A. M. Anwar Syamsu, MM, selaku kepala KUA Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone



Wawancara langsung kepada Ibu Nuraeni



Foto pada saat Mappaenre Botting di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Hal : *Permohonan Judul Skripsi*

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar

Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Milawati
NIM : 10200113014
Semester : VI (Enam)
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut:

1. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Uang Panaik (Studi Kasus Pada Saat Pelamaran di Kab. Bone Kec. kajuara)
2. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepuasan Nasabah Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) As'Adiyah Sengkang Kab. Wajo
3. Peranan Hasil Cafeteria Terhadap Peningkatan Pendapatan P2B UIN Alauddin Makassar (Studi Kasus Cafeteria Yang ada di Kampus II UIN Alauddin Makassar)
4. Analisis Rasio Keuangan Pada BaitulMaal Wat-Tamwil (BMT) As'Adiyah Sengkang Kab. Wajo
5. Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas pada Perbankan Syariah (Bank Mandiri Syariah di Makassar)

Demikianlah permohonan Saya ajukan, atas perhatian dan persetujuan Bapak/Ibu Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 27 Mei 2016

Mengetahui,

Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam,

Pemohon,


Drs. Thamrin Logawali, M.H


Milawati

NIP : 1955 1024 1987 03 1001

NIM : 10200113014

*Acc 27/5-2016 Buatkan LB judul No. 1, 2, dan 3
Mak di tetapkan oleh judul penelitian Skripsi*

Acc 16/6 Bertuan Draft lengkap
Lampirkan foto Kajar Elias
4 perampasan Pambimbing.

Nama : Milawati
NIM : 10200113014
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Uang Panaik (Studi Kasus Pada Saat Pelamaran di Kab. Bone Kec. Kajuara)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang fitrah, tarbiyah, dan sarana paling agung dalam memelihara kontinuitas keturunan dan memperkuat hubungan antarsesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, syariat Islam sangat memperhatikan segala permasalahan di dalamnya, yang disebut *al-ahwal asy-syakhshiyyah* (Hukum yang berkaitan dengan pernikahan, talak, mahar, keturunan dan lain-lain). Pernikahan merupakan suasana salihah yang menjurus kepada pembangunan serta ikatan kekeluargaan, memelihara kehormatan dan menjaganya dari segala keharaman, nikah juga merupakan ketenangan dan tuma'ninah, karena dengannya bisa didapat kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami dan isteri.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata perkawinan adalah kata-kata yang sering kita dengar dan tidak asing lagi bagi kita serta mungkin telah kita pahami artinya. tentunya perkawinan adalah yang sangat dinantikan dan diharapkan oleh

ACE. PEMBIMBING : 1. Prof. H. AMBO AGGE, M.A.S. / 9/1/17.
2. Dr. TAHIR MALOKO, MHI

Berikan skripsi
12/1/17

PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP UANG PANAİK
(Studi Kasus pada saat Pelamaran di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone)



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat melakukan penelitian untuk
memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam UIN Alauddin
Makassar

Oleh :

MILAWATI
NIM. 10200113014

JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2016

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 73 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Milawati**, Nim: **102001130143** tertanggal **13 Januari 2017** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "**Pandangan Ekonomi Islam terhadap Uang Panaik 9 Studi Kasus pada Saat Pelamaran di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone**) "

Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 Jo tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

Pertama : Mengangkat/ Menunjuk saudara :
1. **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.**, Sebagai Pembimbing Pertama.
2. **Dr. Tahir Maloko, M.HI.**, Sebagai Pembimbing Kedua.

Kedua : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 16 Januari 2017


Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

Nomor : 1996 /EB.I/PP.00.9/2017
Lampiran : -
Hal : Undangan Seminar Proposal
A.n. Milawati/10200113014

Samata, 07 Maret 2017

Kepada Yth:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
2. Drs. Tahir Maloko, M.HI. Sebagai Pembimbing II

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami mengundang bapak, untuk menghadiri seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku pembimbing pada Seminar Draft Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Maret 2017
Waktu : 09.00 - Selesai
Judul Skripsi : Pandangan Ekonomi Islam terhadap Uang Panaik di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone
Tempat : Ruangan Seminar

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Wassalam,
a.n Dekan

Kuasa Nomor : 1437/EB.I/Kp.07.6/2017

Tanggal: 07 Maret 2017



Dr. Syaharuddin, M.Si.

NIDN 19600502 199102 1 001

Catatan:

1. SK Pembimbing Draft Skripsi Terlampir
2. Pembimbing diharapkan hadir

Nomor : *2809* /EB.I/PP.00.9/2017

Lamp : -

Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Samata, 5 Juni 2017

Kepada,

**Yth. Kepala UPT P2T BKPM
Prov. Sulawesi Selatan**

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama	: Milawati
NIM	: 10200113014
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Islam
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya "**Pandangan Ekonomi Islam terhadap Uang Panaik di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone**"

Dengan Dosen pembimbing:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
2. Dr. Tahir Maloko, M.Hi.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.
Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam

Dekan

Kuasa Nomor : 2781/EB.1/Kp.07.06/2017

tanggal 31 Mei 2017



Dr. Syaharudin, M.Si.

NIP. 19600502 199102 1 001



1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 8 2 2 9

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 8086/S.01P/P2T/06/2017

Lampiran :

Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.

Bupati Bone

di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 2809/EB.I/PP.00.9/2017 tanggal 05 Juni 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **MILAWATI**
Nomor Pokok : 10200113014
Program Studi : Ekonomi Islam
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP UANG PANAik DI KECAMATAN KAJUARA KABUPATEN BONE "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 Juni s/d 10 Juli 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 07 Juni 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar} di Makassar;

2. *Pertinggal*



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. 0481 - 25056

BUKTI PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN

Nomor Registrasi	3503/REG/VI/DPMPTSP/2017
Nama Pemohon	MILAWATI
Alamat Pemohon	Dusun Buareng Desa Buareng Kec. Kajuara
Jenis Izin	Izin Penelitian (IP)
Waktu Penyelesaian	3 Hari Kerja
Tanggal Daftar	14 Juni 2017
Keterangan :	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Petugas Locket

ARINI ALIAS

****)Lembaran ini wajib dikembalikan/diperlihatkan saat pengambilan Surat Izin***



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.612/VI/IP/DPMPTSP/2017

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : **MILAWATI**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 10200113014
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Buareng Desa Buareng Kec. Kajuara
Pekerjaan : Mahasiswi UIN Alauddin Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**“ PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP UANG PANAİK DI KECAMATAN KAJUARA
KABUPATEN BONE ”**

Lamanya Penelitian : 14 Juni 2017 s/d 15 Juli 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Camat Kajuara Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 14 Juni 2017

KEPALA,



Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone
4. Camat Kajuara Kab. Bone di Bojo
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

KECAMATAN KAJUARA

Alamat : Jl. Poros Sinjai-Bone, Kel. Awang Tangka

BOJO

SURAT KETERANGAN

No. 288/KJR/VII/2017

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor 2809/EB.I/PP.00.9/2017 dan Kepala BKPM Sulse Nomor : 8086/S.01P/P2T/06/2017, maka Camat Kajuara menerangkan bahwa :

Nama : MILAWATI
NIM : 10200113014
Program Studi : Ekonomi Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Bonto Bulaeng, Desa Buareng Kec. Kajuara Kab. Bone

Benar mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian di Kecamatan Kajuara sejak tanggal 14 Juni s.d. 15 Juli 2017 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul :

**"PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP UANG PANAİK DI
KECAMATAN KAJUARA KABUPATEN BONE"**

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kajuara, 28 Juli 2017

An. CAMAT
Sekcam.

ILYAS, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19670927 199803 1 005

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1496 TAHUN 2017

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n.Milawati, NIM : 10200113111
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama : **Milawati**, NIM : **10200113111**, tertanggal **29 September 2017** untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Sekertaris : Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Tahir Maloko, M.Hi.
Penguji I : Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag.
Penguji II : Ismawati, SE., M.Si.
Pelaksana : Rasmawandi Rara

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 03 Oktober 2017



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NID. 19881022 198703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata – Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : **5336** /EB.1/PP.00.9/2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Undangan Seminar Hasil**

Samata, **07** Oktober 2017

Kepada Yth
Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : Milawati
NIM : 10200113111
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pandangan Ekonomi Islam terhadap Uang Panai di Kecamatan Kajuran Kabupaten Bone

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017
Waktu : 09.00 - 16.00 WITA
Tempat : Ruang Seminar

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1700 TAHUN 2017**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : **Milawati**
NIM : **10200113014**
Tanggal : **23 Oktober 2017**
Mahasiswa Jurusan : **Ekonomi Islam**
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "**Uang Panak dalam Pandangan
Ekonomi Islam di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone**"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/
Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk
panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin
menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja UIN Alauddin Makassar
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN
Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin
Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang
menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang
Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.**
Sekretaris : Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.
Penguji I : Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag.
Penguji II : Ismawati, SE., M.Si
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Pembimbing II : Drs. Tahir Maloko, M. HI
Pelaksana : Mubín Nasir, S.EI
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang
namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat
keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh
rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : **Samata-Gowa**
Pada tanggal : **23 Oktober 2017**



Dekan,
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002



Nomor : 5701 /EB.1/PP.00.9/2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Undangan Ujian Munaqasyah

Samata, Oktober 2017

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian
Munaqasyah Mahasiswa:

Nama : Milawati
NIM : 10200113014
Jurusan : EKONOMI ISLAM
Judul Skripsi : "Uang Panaik dalam Pandangan Ekonomi Islam di
Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 03 November 2017
Waktu : 09.00-11.00 Wita
Tempat : L. 206

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Milawati, lahir di Bonto Bulaeng 02 November 1995 dari rahim seorang Ibu yang sangat hebat, cinta, pengorbanan yang tulus membesarkanku sampai saat ini yaitu Ibunda Nurlaela, dan seorang ayah yang takkala hebat pula yang bernama Amiruddin.

Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang hidup dalam lingkungan keluarga sederhana. Dan penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar tahun 2001-2007 di SD Inpres 6/75 Buareng kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama tahun 2007-2010 di SMP Negeri 3 Sinjai Utara kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai dan pada tahun 2010-2013 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sinjai Utara. Selanjutnya pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada jalur SNMPTN dan diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam.

Adapun pengalaman organisasi penulis intra kampus yaitu Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Islam periode 2014-2015, adapun organisasi ekstra kampus ialah pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Rayon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2015-2016. Semoga kedepannya kita semua selalu dalam lindungan Allah swt dan mendapat kemudahan disetiap usaha atau pekerjaan masing-masing serta termasuk dalam golongan orang-orang yang memperoleh Ridho-Nya. Amiin.